**BAB II**

**SIKAP AS TERHADAP PEMILU IRAN 2013**

1. **Politik Luar Negeri Amerika Serikat**

Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijakan suatu negara dalam hubungan luar negerinya untuk memenuhi, memajukan dan melindungi kepentingan nasionalnya sehingga kemudian hal inilah yang melatarbelakangi sikap dan arah tindakan suatu negara terhadap negara lain. Garis besar politik luar negeri AS ialah menjaga lingkungan yang damai, yang memungkinkan perekonomian dunia berkembang dan demokratisasi di seluruh dunia.[[1]](#footnote-2)

Setiap kebijakan Amerika Serikat yang dikeluarkan dengan dalih untuk kepentingan bersama masyarakat internasional, tetap saja pada dasarnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan nasional Amerika sendiri dan yang terpenting kebijakan tersebut dapat memenuhi atau menjadi jalan bagi pencapaian tujuan Amerika Serikat yang sesungguhnya. Anthony Lake menggariskan tujuh aspek tujuan nasional Amerika Serikat pasca Perang Dingin, yaitu: (1) mempertahankan Amerika Serikat, warga negaranya di dalam dan luar negeri, serta para sekutunya, dari berbagai bentuk serangan langsung; (2) mencegah timbulnya agresi yang dapat mengganggu perdamaian internasional; (3) mempertahankan kepentingan ekonomi Amerika Serikat; (4) menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi; (5) mencegah proliferasi senjata nuklir; (6) menjaga rasa percaya dunia internasional terhadap Amerika Serikat; (7) memerangi kemiskinanan, kelaparan dan pelanggaran terhadap HAM (Lake, 1995).[[2]](#footnote-3)

Upaya yang mungkin ialah memetakan politik luar negeri pada rezim tidak demokratis, siapa teman dan lawan sehingga AS menerapkan standar ganda sebagai bentuk inkonsistensi bagi politik luar negeri AS. Standar ganda menjadi bentuk distorsi ketika berbenturan dengan kepentingan nasional (national interest) Amerika yang lain. Maka berdasarkan tujuan nasional, paling tidak ada tiga kepentingan yang berstandar ganda yaitu mencegah proliferasi senjata nuklir, demokrasi, dan HAM (Hak Asasi Manusia).

**B. Standar Ganda Politik Luar Negeri Amerika**

**B.1 Proliferasi Senjata Nuklir[[3]](#footnote-4)**

Menurut Mantan Menlu Amerika Serikat, Henry Kissinger, setidaknya ada tiga alasan yang mendorong beberapa negara untuk mendapatkan senjata nuklir[[4]](#footnote-5):

1. Keinginan untuk menjadi sebuah kekuatan dunia didasarkan pada kepercayaan bahwa suatu negara tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri melawan berbagai bahaya yang mengancam upaya untuk menjadi kekuatan dunia.

2. Negara yang merasa terancam oleh negara tetangga dengan populasi atau sumber daya yang lebih besar, dapat dilihat dari peralatan senjata nuklir, bersikap tidak dapat menerima risiko atau membuat alat pencegahan melawan berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka.

3. Adalah negara-negara yang tekun merusak keseimbangan kekuatan di kawasan mereka dan melihat persenjataan nuklir sebagai sebuah alat untuk mengintimidasi tetangga mereka dan sebagai bentuk intervensi dari luar untuk mengecilkan hati.

Untuk kebijakan Amerika mengenai senjata nuklir sendiri, terdapat empat kategori diantaranya yaitu sebagai berikut[[5]](#footnote-6):

1. *Declaratory Policy*, pernyataan publik yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa Amerika Serikat memiliki senjata nuklir, bagaimana mereka akan menggunakannya dan usaha-usaha apa yang akan mereka lakukan untuk mengurangi bahaya senjata tersebut.

2. *Acquisition Policy*, kebijakan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dan produksi sistem senjata nuklir.

3. *Employment Policy*, berhubungan dengan bagaimana senjata nuklir akan digunakan

4. *Deployment Policy*, berkaitan erat dengan *Employment Policy* dan berhubungan dengan dimana kekuatan nuklir tersebut ditempatkan.

Untuk negara Amerika Serikat sendiri, pada dasarnya kebijakan luar negeri dalam bidang nuklir selain melarang setiap negara untuk melakukan penyebarluasan senjata nuklir, juga akan memberikan sanksi kepada negara-negara yang melanggar pelarangan penyebarluasan senjata nuklir tersebut. Amerika tidak lagi menganggap lebih lanjut proliferasi senjata sebagai masalah tetapi sekarang membuat perbedaan antara proliferasi baik dan buruk. [[6]](#footnote-7) Perbedaan proliferasi tersebut menimbulkan standar ganda yang terlihat pada bentuk dukungan Amerika terhadap nuklir Israel dengan alasan bahwa Israel memiliki persyaratan keamanan yang unik dari perspesktif ukuran, sejarah dan daerahnya.[[7]](#footnote-8) Bentuk dukungan Amerika tersebut ialah ketika Amerika memberikan Israel izin kepemilikan senjata nuklir di Dimona, Gurun Nejev, dekat perbatasan Israel-Jordania dan memiliki sebanyak 200 hulu ledak nuklir yang menjadikan Israel satu-satunya negara pemilik senjata nuklir di Timur Tengah. Di sisi lain Amerika terus melakukan penekanan kepada program nuklir Iran dengan beralasan bahaya konflik yang akan terjadi di wilayah Jazirah Arab apabila Iran terus melakukan pengayaan uranium (cikal bakal bom nuklir) dan jika Iran meneruskan program aktifitas nuklirnya, maka akan menghancurkan kestabilan dunia. Bagi Amerika kekuatan nuklir Iran adalah ancaman serius karena kekuatan nuklir Iran akan memicu munculnya *nuclear domino effect*, dimana akan memicu kepemilikan senjata nuklir dan perlombaan senjata oleh negara-negara sekawasan lainnya. Sehingga pada akhirnya dapat mengancam eksistensi Amerika sendiri karena negara-negara Timur Tengah bersatu dan memusuhinya. Kekhawatiran Amerika terhadap nuklir Iran lainnya ialah jatuhnya senjata nuklir Iran ke tangan gerakan politik Islam Timur Tengah yang didukung Iran, seperti misalnya Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina, yang kemudian dikhwatirkan akan digunakan untuk menyerang Israel.

**B.2 Penegakan Demokrasi dan HAM**

Pada intinya, dalam menjalankan politik internasionalnya ada dua pilar utama yang menjadi dasar bagi Amerika Serikat yaitu, demokratisasi (termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan HAM). Dalam menyusun dan menjalankan kebijakan luar negeri bagi Amerika Serikat, Amerika Serikat harus berperan serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan regional suatu negara sebelum permasalahan tersebut menyebar menjadi permasalahan internasional (*engagement*), salah satu cara penyelesaian konflik dunia adalah dengan penyebaran dasar-dasar demokrasi Amerika Serikat ke seluruh penjuru dunia (*enlargement*) karena dengan begitu Amerika Serikat dapat menyebarkan pengaruhnya ke negara-negara lain dan pada intinya dapat mengendalikan tatanan dunia internasional di bawah kekuasaan Amerika Serikat.[[8]](#footnote-9)

**Demokrasi** dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang [kekuasaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan), atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara [beradab](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Beradab&action=edit&redlink=1). Demokrasi adalah [sistem manajemen](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_manajemen&action=edit&redlink=1) kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan [etika](http://id.wikipedia.org/wiki/Etika) serta peradaban yang menghargai [martabat](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Martabat&action=edit&redlink=1) manusia. Demokrasi adalah basis filosofis politik luar negeri Amerika. Francis Fukuyama mengatakan bahwa ’’Gagasan tentang demokrasi sangat terkait erat dengan identitas nasional Amerika. Amerika dengan penuh semangat terlibat di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali, bertindak sebagai kekuatan perdamaian dan kemakmuran dunia. Memperluas masyarakat demokrasi global adalah tujuan utama dari kebijakan luar negeri Amerika’’.[[9]](#footnote-10)

Secara umum atau secara global, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh keinginan untuk memperluas pengaruh demokrasi mereka ke seantero penjuru dunia atau dengan kata lain melakukan demokratisasi secara internasional. Program pendemokratisasian tersebut terlihat pada apa yang dilakukan Amerika yang dimanifestasikan dalam tiga wajah liberalisme, yaitu liberalisme politik dengan wujud demokrasi liberal, liberalisme ekonomi berbentuk kapitalisme, dan liberalisme moral. Amerika meyakini gema demokrasi di negara-negara lain akan membantu Amerika dalam mengkomunikasikan kepentingannya. Program pendemokratisasian tersebut dapat dicermati pada program *Greater Middle East* yang diluncurkan Amerika di tahun 2002, yang intinya adalah demokratisasi di Timur Tengah.[[10]](#footnote-11)

Standar ganda juga dilakukan Amerika dalam realitas politik internasional yang lain. Hak asasi manusia (HAM) adalah [hak](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak)-hak yang telah dipunyai [seseorang](http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia) sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ([*Declaration of Independence of USA*](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Declaration_of_Independence_of_USA&action=edit&redlink=1)) pada 4 Juli 1776[[11]](#footnote-12) sehingga Amerika dikenal sebagai pioneer dalam membela HAM sejak saat itu.

Standar ganda dari konsep HAM pun dilakukan Amerika dalam realitas politik internasional. Dalam banyak kasus, terutama yang menyangkut kepentingan Israel, maka yang terjadi justru pengelabuan secara nyata tentang pelanggaran HAM. Jika tindakan politik *againts humanity* itu dilakukan oleh kelompok yang berlabel Islam, maka secara lantang Amerika menyatakan sebagai pelanggaran HAM, namun jika yang melakukannya adalah Israel, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi sebagai cara untuk menumpas terorisme yang berada di sebuah negara. Contoh kasus lainnya ialah aneksasi terhadap Irak sebagai negara merdeka adalah tindakan nyata mengenai pelanggaran politik tingkat tinggi, akan tetapi wacana yang dikembangkan Amerika adalah mengenyahkan rezim otoriter dan pembebasan rakyat dari cengkeraman pemerintah yang tiranis. Dari kedua kasus di atas sepertinya Amerika mengartikan melanggar HAM sebagai sebuah *doublespeak* belaka.

Chen Shiqiu , ahli tim HAM PBB , berpendapat, Amerika berkeras berbuat demikian adalah untuk mencapai tujuan mengintervensi urusan intern negara lain dengan menggunakan isu hak asasi manusia.[[12]](#footnote-13) Namun, perbuatan Amerika itu sering kontraproduktif. Pengaruh perbuatan Amerika itu adalah negatif, yakni mengungkap intervensi mereka atas urusan intern negara lain dengan menggunakan masalah HAM, menerapkan standar ganda dalam masalah HAM, dan menggunakan HAM sebagai senjata diplomatik untuk menghadapi negara-negara lain. Amerika seperti ingin menjadi pahlawan pembela HAM dan polisi dunia, dan memaksakan konsep, standar dan prakteknya tentang HAM kepada negara lain. Ini adalah manifestasi hegemonis di bidang politik yang tidak mungkin diterima oleh masyarakat internasional.

Standar ganda yang seringkali diterapkan oleh Amerika merupakan suatu upaya untuk menjaga kepentingan Israel di Timur Tengah. Amerika akan terus berupaya untuk terus mendominasi dan mengintervensi negara-negara kaya minyak ini dan berupaya untuk memecah belah sesama negara Timur Tengah agar tetap di bawah kendali Amerika.

Jelaslah bahwa HAM dan demokrasi yang menjadi fokus isu global kini menjadi isu kepentingan bagi Amerika. Pasca Perang Dunia II mencatat satu kenyataan bahwa setiap kali kepentingan Amerika dan slogan demokrasi dan HAM berada saling bertentangan, maka semua itu harus dikorbankan demi kepentingan Amerika.[[13]](#footnote-14) Dengan dasar ini, standar ganda senantiasa menjadi penentu sejarah yang membongkar esensi kebohongan demokrasi yang diinginkan oleh Amerika. Standar ganda Amerika dalam menyokong prinsip dan nilai dasarnya ketika bersinggungan dengan kepentingannya yang lain, maka Amerika memberlakukannya secara selektif. Artinya, prioritas utama Amerika di Timur Tengah sebenarnya bukan masalah demokrasi dan HAM, tapi yang terpenting bagi Amerika adalah stabilitas negara-negara demi membantu terealisasinya kepentingan Amerika.

1. **Sistem Pemerintahan Iran**

Sistem politik Iran ialah sistem pemerintahan Islam yang didasarkan pada prinsip demokrasi agama. Dalam sistem demokrasi agama, legalitas sistem berlandaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan dan mengamalkan hukum agama. Meski berorientasikan Tuhan dalam pemerintahan Islam tidak menghalang perhatiannya kepada kemaslahatan rakyat. Setelah Revolusi Islam Iran pada 30 tahun lalu, dalam sebuah referendum rakyat Iran telah menetapkan republik sebagai bentuk pemerintahannya. Referendum 1979 itu diikuti lebih dari 98 persen warga Iran yang berhak memilih. Dari angka partisipasi 98 persen itu, sebanyak 98,99 persen menyetujui bentuk pemerintah republik.[[14]](#footnote-15)

Sistem politik Iran merupakan sistem campuran dari kepemimpinan yang ditunjuk langsung dan yang dipilih oleh lembaga. Berikut adalah lembaga penting dalam sistem politik Iran;

1. Pemimpin tertinggi (*Syura-e-rahbari*)

Pemimpin tertinggi adalah posisi tertinggi dalam otoritas politik dan keagamaan negara. Pemimpin tertinggi menunjuk komandan pasukan militer, kepala kejaksaan, kepala kehakiman, termasuk 6 ahli hukum Islam yang tergabung dalam 12 anggota Dewan Pengampu ( Guardian Council ). Pemimpin tertinggi dipilih oleh Majelis Ahli yang beranggotakan 86 fraksi yang bertanggungjawab mengawasi tugas-tugas yang dijalankan pemimpin tertinggi keagamaan.

1. Presiden

Presiden adalah bawahan Pemimpin tertinggi, yang mengatur kebijakan ekonomi dan manajemen hubungan nasional. Presiden menandatangani kesepakatan dengan pemerintah asing, menyetujui pengangkatan duta-duta besar dan bertanggungjawab menjalankan fungsinya sebagai lembaga eksekutif. Presiden memilih Dewan Menteri atau kabinet meski penunjukkannya mendapat persetujuan parlemen. Presiden menjadi ketua Dewan Keamanan Tertinggi Nasional yang berkoordinasi membuat kebijakan pertahanan dan keamanan namun keputusan akhir memobilisasi pasukan militer, pertahanan nuklir ataupunkebijakan luar negeri, berada di tangan pemimpin tertinggi. Masa jabatan presiden Iran adalah 4 tahun, tidak boleh lebih dari 2 kali menjabat.

1. Dewan Pengampu (*Shura-e- Nigahban*)

Dewan Pengampu merupakan lembaga legislatif tertinggi**,** yang keanggotaannya ditunjuk. Terdiri dari 12 ulama dan ahli hukum Islam. Setengahnya ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi, sisanya disetujui melalui parlemen Iran. Dewan Pengampu memiliki otoritas konstitusional untuk mem-veto keputusan parlemen dan menyeleksi capres yang layak ikut pemilihan. Saat ini dewan berada di bawah kontrol kalangan konservatif religius.

1. Parlemen dikenal dengan sebutan *Majelis Syura Islami*, merupakan lembaga legislatif nasional yang beranggotakan 290 perwakilan melalui pemilihan.
2. Pasukan militer

Militer Iran berada di bawah bendera Garda Revolusi (*Revolutionary Guard)*. Garda Revolusi bertugas melindungi para pemimpin politik baru dan lembaga-lembaga serta menjaga semangat revolusi. Pemimpin tertinggi menunjuk komandan Garda Revolusi dan komandan reguler militer.

1. Dewan penasehat (*Mejlis-i Khubregan* )

Setiap perbedaan antara parlemen dan Dewan Pengampu akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh Dewan Penasehat. Dewan Penasehat merupakan lembaga penasehat bagi pemimpin tertinggi. Dewan Penasehat membuat keanggotaan perkumpulan rakyat Iran, seperti organisasi para pemimpin agama dan politik. Anggota Dewan ditunjuk oleh pemimpin tertinggi. Empat tahun ini, Dewan memiliki kekuasaan khusus sebagai kepanjangan pemerintah sesuai instruksi pemimpin tertinggi. [[15]](#footnote-16)

Sistem demokrasi agama terlihat berbeda dengan sistem demokrasi liberal ala Amerika. Esensi dari sistem demokrasi agama ialah Alquran dan Hadits. Oleh sebab itu sistem demokrasi agama turut menyediakan lahan bagi mengisi keperluan spiritual rakyat. Perbedaan lainnya ialah perhatian demokrasi agama kepada individu dan masyarakat. Berbeda dengan sistem liberalis dimana prinsip individualisme dikedepankan dan sistem ini bergerak ke arah bagi penyediaan kepentingan. Sistem liberal menghasilkan Hedonisme yang senantiasa mengambil keuntungan dan ambisius. Sebaliknya, sistem pemerintahan Islam, menekankan peran moral dan bertanggungjawab individu dalam membina dirinya dan masyarakat sehingga lingkungan sosial hanya akan menerima individu yang berakhlak dan kepribadian yang santun. Oleh sebab itu sistem demokrasi agama adalah sebuah sistem yang adil dan netral jauh dari ektrim liberalisme mengenai individu dan masyarakat yang membawa keburukan kepada manusia. Mengenai sistem negara, Alexander Prokhanov menjelaskan, "Keadilan adalah asas utama filsafat keagamaan dan sistem kenegaraan Islam. Keadilan inilah yang melahirkan satu bentuk demokrasi di Iran. Pemilihan umum adalah salah satu aturan di Iran yang mengikat dan tidak bisa diubah. Pemilu ini meliputi pemilihan anggota parlemen, presiden maupun untuk memilih pemimpin spiritual. Pemerintahan Iran tidak mengenal keputusan individu. Kebijakan yang diputuskan diambil lewat musyawarah dan koordinasi yang ketat antara berbagai pusat kekuasaan”.[[16]](#footnote-17) Dalam sistem pemerintahan Islam yang demokratis ini, agama dan politik terkombinasikan dengan baik.

1. **Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan [retorika](http://id.wikipedia.org/wiki/Retorika), baik propaganda maupun agitasi, [*public relations*](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_relations&action=edit&redlink=1), komunikasi massa, lobby dan lain-lain.[[17]](#footnote-18) Pemilu dilaksanakan dengan tujuan keterwakilan politik, integritas politik dan pemerintahan efektif.[[18]](#footnote-19) Dengan tiga tujuan tersebut pemilu akan menghasilkan pemerintahan yang efektif, menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang kuat. Oleh sebab itu pemilu merupakan sarana demokrasi karena pemilu adalah saluran kedaulatan rakyat.[[19]](#footnote-20) Melalui saluran inilah, seseorang dapat menunjukkan sikap politiknya dan melalui hal ini pula, proses dan mekanisme politik dapat dibangun.[[20]](#footnote-21)

**D.1 Sistem Pemilihan Umum Iran**

Dalam pemerintahan demokrasi agama, rakyat memainkan perang penting. Rakyat dilibatkan untuk memilih pemimpin dan lewat wakil pilihan ini mereka menetapkan undang-undang yang bersesuaian dengan agama dan rakyat memainkan peran aktif dalam menentukan masa depan negara. Menurut UUD (Undang-undang Dasar) RII (Republik Islam Iran), rakyat memilih presiden republik, wakil anggota parlemen dan wakil dewan kota, bahkan Rahbar turut dilantik lewat suara tidak langsung rakyat. Dalam hal ini semua orang berpartisipasi dalam kerangka UUD dan ajaran tinggi Islam. Dalam demokrasi agama penggunaan metode seperti pemilu dan jajak pendapat, bersandarkan kepada suara mayoritas, merupakan jalan yang paling praktis dan terbaik yang diterima, namun juga tidak hanya menerima suara mayoritas yang bersesuaian atau tidak bertentangan dengan undang-undang konstruktif dan ajaran Islam. Dalam sistem demokrasi agama Rahbar memiliki peran penting dan khusus. Rahbar tidak saja mengurusi urusan negara dan fasilitas pemerintahan dan menguasai urusan politik dan ekonomi, tetapi juga turut memikul peran membimbing dan memimpin rakyat karena Rahbar merupakan orang yang dianggap berpengetahuan tinggi dalam agama Islam serta mempunyai pandangan dalam pelaksanaan undang-undang Islam.

Sejak saat itu sebanyak 32 pemilihan umum telah digelar sepanjang tiga dasawarsa Republik Islam Iran. Pemilu itu berupa pemilihan presiden (pilpres), pemilihan anggota parlemen, hingga pemilihan dewan kota. Pemilihan walikota diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, yang terakhir diselenggarakan pada 2011. Parlemen Iran (Majelis-e Syura-e Islami) merupakan lembaga legislatif yang beranggotakan 290 orang. Anggota Majelis dipilih melalui pemilu setiap 4 tahun sekali dengan sistem distrik. Setiap 10 tahun rasio anggota Majelis ditinjau kembali sesuai dengan jumlah penduduk.[[21]](#footnote-22) Pemilihan legislatif Iran akan diselengarakan pada 2 Maret 2012.

Sistem pemilu Iran mengizinkan siapapun warganya yang memenuhi syarat untuk mengajukan diri sebagai kandidat presiden. Bahkan pada pemilihan presiden periode ke sepuluh yaitu pada tahun 2009 tercatat 475 sukarela yang mendaftarkan diri sebagai kandidat presiden Iran. Untuk putaran selanjutnya Dewan Garda Konstitusi (Majelis Wali) Iran mengkaji kelayakan para sukarela kandidat presiden dan melakukan penyeleksian. Adapun syarat-syarat terpilihnya para kandidat presiden, “agamis, cakap dalam berpolitik, penduduk Iran asli, berkewarganegaraan Iran, berkemamuan memimpin dan mengatur, berpengalaman, bertakwa, beriman dan berkeyakinan pada prinsip-prinsip Republik Islam Iran dan agama resmi negara”. Setelah uji kelayakan, para calon yang dinyatakan gagal dan tereliminasi masih diberi kesempatan lima hari untuk mengajukan protes dan mempertahankan argumen kelayakannya kepada Dewan Garda Konstitusi. Dewan Garda adalah satu-satunya instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti pengaduan kecurigaan dan protes, dan jika diperlukan perhitungan ulang untuk beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara), maka hal itu akan dilakukan dengan keberadaan perwakilan para calon. Setelah ditetapkan maka kandidat berhak melakukan kampanye untuk mencari dukungan dan mendulang suara. Setiap calon [presiden](http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Iran) Iran tersebut akan dipilih melalui [pemilihan umum](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum). Dalam sistem pemilu Iran, jika seorang kandidat gagal meraih mayoritas 50 % suara, akan dilangsungkan putaran kedua untuk 2 peraih suara terbanyak. Presiden terpilih akan memimpin Iran selama 4 tahun atau 2 periode berturut-turut.

Pemilu presiden merupakan pesta demokrasi di Iran yang paling monumental karena eksekutiflah yang peranannya akan sangat berpengaruh langsung terhadap rakyat. Monumentalnya pilpres menunjukkan betapa sistem demokrasi religius telah berakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Iran. Menanggapi besarnya partisipasi rakyat Iran dalam pemilu presiden, dosen universitas dan pakar masalah Asia Barat asal India, Dr. Qamar Agha, menyatakan, "Dengan menggelar pemilu yang demikian besar dan dengan cara yang benar-benar tenang dan bebas, Iran menunjukkan bahwa negara itu memiliki sistem demokrasi yang kuat dan sangat matang". Salah satu faktor yang mendorong rakyat Iran begitu antusias untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib bangsanya melalui pemilu adalah semangat yang muncul di kalangan warga menjelang pemilu.[[22]](#footnote-23) Oleh sebab itu Pemilihan umum Iran sangat demokratis karena di Republik Islam Iran, rakyat punya peran penting dan tidak tergantikan dalam mengelola negara dan menentukan masa depannya. Kedaulatan rakyat Iran atas nasibnya lebih banyak diterapkan dalam pemilu dan referendum. Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar Ayatollah Al-Udzma Sayyid Ali Khamenei menilai pemilu menjadi pondasi kerakyatan bagi negara. Beliau menegaskan kini Republik Islam Iran berhasil menyelenggarakan sekitar 30 pemilu yang merakyat dan bebas kurang dari 30 tahun dalam situasi sulit dan mudah. Semuanya ini menunjukkan bahwa Iran kini merupakan negara demokrasi paling jujur di dunia. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei senantiasa menekankan demokrasi agama hanya dapat terbentuk dari keikutsertaan, kehendak rakyat dan hubungan pemikiran dan emosi mereka dengan transformasi dan kemajuan negara.

Selama lebih dari 30 tahun umur Republik Islam Iran, berbagai pemilu yang dilaksanakan di Iran senantiasa sehat dan dapat dipercaya. Tentu saja negara-negara Barat, khususnya Amerika yang menginginkan hegemoni penuh Timur Tengah, dengan pengetahuan mereka akan kenyataan dan kebebasan yang ada di Iran selalu berusaha untuk mempertanyakan pemilu Iran.[[23]](#footnote-24) Perspektif bias yang hanya mereka lakukan demi hasil pemilu yang menguntungkan strategi kebijakan politik luar negeri masing-masing. Menurut Direktur Eksekutif *Centre for Dialogue of Cooperation among Civilization*, Ahmad Mu`ti, pemilihan presiden yang berjalan cukup lancar dan aman menjadi simbol kemenangan demokrasi di negeri Islam tersebut.[[24]](#footnote-25)

1. #  “Foreign Policy for a World of Decision”, RAND Corporation.

 [↑](#footnote-ref-2)
2. Budi Mulyana. “[Menghentikan Hegemoni Amerika Serikat](http://hbmulyana.wordpress.com/2011/04/03/menghentikan-hegemoni-amerika-serikat/)”. 3 April 2011. <http://hbmulyana.wordpress.com/>**,** diakses tanggal 8 Februari 2012. [↑](#footnote-ref-3)
3. Jurnal ilmiah Universitas Indonesia. Op.Cit. 1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Diambil dari artikel berjudul “India Dapat Pas Jalan Nuklir” dari surat

kabar “Bisnis Indonesia” terbitan tanggal 6 Maret 2006 [↑](#footnote-ref-5)
5. Nuclear Weapon Policy, http://nrdc.org/nuclear/nuguide/nwipoli.asp [↑](#footnote-ref-6)
6. *Jurnal Humaniora dan Ilmu Sosial* *Vol.* *2 No 2 [Edisi Khusus - Januari 2012. www.ijhssnet.com/journals/Vol\_2\_No\_2\_Special\_Issue\_January\_2012/23.pdf.* [↑](#footnote-ref-7)
7. Milyas. “Israel:Berkat AS, Nuklir Kami Tak Diusik”. <http://knrp.or.id/berita/aktual/israel-berkat-as-nuklir-kami-tak-diusik.htm>. Kamis, 8 Juli 2010. [↑](#footnote-ref-8)
8. Diambil dari artikel berjudul “India Dapat Pas Jalan Nuklir” dari surat kabar “Bisnis Indonesia”. Op.cit. 27. [↑](#footnote-ref-9)
9. Nopriadi, “Seni Mengapresiasi Sebuah Peradaban”, <http://nopriadi.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal>, 19 Mei 2008, diakses tanggal 8 Februari 2012. [↑](#footnote-ref-10)
10. Musthafa Abd Rahman. “Demokrasi di Arab dan Standar Ganda AS”, <http://internasional.kompas.com/read/2011/04/25/08254212/Demokrassi.di.Arab.dan.Standar.Ganda.AS>, diakses tanggal 8 Februari 2012. [↑](#footnote-ref-11)
11. #  Andhika Arya Timor, “The Declaration Of Independence Diragukan Legalitasnya, Bagaimana Dengan Proklamasi Indonesia?”, *Kompas (online),* 19 October 2011, <http://sejarah.kompasiana.com/2011/10/19/the-declaration-of-independence-diragukan-legalitasnya-bagaimana-dengan-proklamasi-indonesia/>, diakses tanggal 8 Februari 2012.

 [↑](#footnote-ref-12)
12. ###  “Terpilihnya Tiongkok Sebagai Anggota Dewan HAM PBB”, [http://blog.gmane.org/gmane.culture.region.china.budaya-tionghua/month=20060501/page=45](http://blog.gmane.org/gmane.culture.region.china.budaya-tionghua/month%3D20060501/page%3D45), diakses tanggal 8 Februari 2012.

 [↑](#footnote-ref-13)
13. [Slebore](http://forum.detik.com/member.php?u=201573) , “Memahami Serangan Budaya Barat”, <http://forum.detik.com/memahami-serangan-budaya-barat-t192690.html>, 22 Juni 2010, sumber rujukan dari [http://indonesian.irib.ir/index.php/...n-budaya-barat](http://indonesian.irib.ir/index.php/features/655-memahami-serangan-budaya-barat), diakses tanggal 8 Februari 2012. [↑](#footnote-ref-14)
14. Behrooz Kamalvandi, “Belajar Sistem Pemilu Sederhana dari Iran”, <http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel.php?aid=34832>, [↑](#footnote-ref-15)
15. #  “Siapa yang berkuasa di Iran?”, BBC Indonesia (online), <http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091125_iran_election_five.shtml>, diakses tanggal 20 Februari 2012.

 [↑](#footnote-ref-16)
16. ##  “Realita Iran di Mata Seorang Penulis Rusia”. <http://www.al-shia.org/html/id/page.php?id=1187>, diakses tanggal 8 Februari 2012

 [↑](#footnote-ref-17)
17. “Pemilihan Umum”, Wikipedia, id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\_umum, diakses tanggal 8 Februari 2012. [↑](#footnote-ref-18)
18. **Didik Supriyanto. “**Menetapkan Tujuan Pemilu”. **Detiknews.** <http://news.detik.com/read/2010/09/07/120252/1436659/103/menetapkan-tujuan-pemilu>**, 7 September** /2010**,** diakses tanggal 8 Februari 2012. [↑](#footnote-ref-19)
19. Cecep Darmawan. “Penguatan Demokrasi”. <http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=13>. 29 November 1999, diakses tanggal 8 Februari 2012. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid [↑](#footnote-ref-21)
21. ## Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran, Republik Islam Iran Merangkap Republik Azerbaijan dan Republik Turkmenistan. <http://www.kemlu.go.id/tehran/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=1&l=id>, diakses tanggal 8 Februari 2012.

 [↑](#footnote-ref-22)
22. #  Ibid

 [↑](#footnote-ref-23)
23. #  Iran Indonesian Radio. “Perpektif Rahbar, Pemilu Iran Sehat dan Meriah”. [http://indonesian.irib.ir/perspektif-rahbar/-/asset\_publisher/rAN7/content/perpektif-rahbar-pemilu-iran-sehat-dan-meriah. 24 September 2011](http://indonesian.irib.ir/perspektif-rahbar/-/asset_publisher/rAN7/content/perpektif-rahbar-pemilu-iran-sehat-dan-meriah.%2024%20September%202011), diakses tanggal 8 Februari 2012.

 [↑](#footnote-ref-24)
24. #  Editor: Aditia Maruli. “Pemilu Iran Contoh Demokrasi Yang Baik”. Artikel AntaraNews.com. <http://www.antaranews.com/view/?i=1244970146&c=INT&s=TIM>. 14 Juni 2009, diakses tanggal 8 Februari 2012.

 [↑](#footnote-ref-25)